

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Padang, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan aturan diversi di Pengadilan Negeri Padang dilakukan melalui beberapa tahap yang diawali dengan tahap persiapan diversi, tahap musyawarah diversi, tahap kesepakatan diversi, tahap pelaksanaan kesepakatan diversi, dan tahap registrasi diversi. Dalam pelaksanaan aturan diversi di Pengadilan Negeri Padang hakim tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kendala dalam pelaksanaan aturan diversi di Pengadilan Negeri Padang yang seringkali ditemui oleh hakim yaitu pada tahap persiapan diversi dan pada tahap pelaksanaan musyawarah diversi. Pada tahap persiapan diversi kendala yang dihadapi oleh hakim adalah pada saat pemanggilan para pihak yang terlibat dalam proses diversi, para pihak yang tidak mau direpotkan untuk dapat hadir di dalam proses musyawarah diversi. Pada tahap pelaksanaan diversi kendala yang dihadapi oleh hakim adalah persetujuan para pihak terutama

pihak korban, pihak korban cenderung langsung menolak untuk dilaksanakan musyawarah diversi, dan juga kurang lengkapnya laporan penelitian tentang anak sebagai pelaku yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, sehingga menyulitkan hakim dalam mengambil keputusan mengenai bagaimana solusi penyelesaian perkara anak tersebut.

B. Saran

1. Disarankan kepada hakim sebagai fasilitator diversi, dalam pelaksanaan diversi harus lebih memperhatikan lagi kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Agar tujuan dan manfaat dari pelaksanaan diversi dapat tercapai.
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya hakim yang memiliki sertifikat hakim anak agar mengikuti sosialisasi tentang diversi, untuk lebih meningkatkan pemahaman hakim dalam pelaksanaan aturan diversi, karena diversi merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana anak maka sosialisasi tentang diversi sangat dibutuhkan, dan juga perlunya ditingkatkan kordinasi antar pihak-pihak yang terkait agar kendala-kenala yang terjadi didalam pelaksanaan diversi dapat di atasi dengan baik.